

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT DI KELURAHAN SRONDOL KULON TERHADAP KETAHANAN EKONOMI

Alvita Putri Khandria

Email : alvitaputri@students.undip.ac.id

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Persebaran Virus Covid-19 yang terjadi saat ini semakin banyak menimbulkan berbagai problematika. Dampaknya dapat terlihat dari berbagai sisi kehidupan, yaitu dibidang ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ditambah lagi dengan jumlah kasus yang terus meningkat. Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam pencegahan maupun penanganan kasus Covid-19 sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Langkah yang ditempuh pemerintah ialah dengan melalui implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun kebijakan ini ternyata berdampak pada aspek ketahanan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak ketahanan ekonomi dan apa saja faktor keberhasilan dalam menstabilkan ketahanan ekonomi di Kelurahan Srandol Kulon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tipe metode ini, isi penelitian berisikan upaya pendeskripsian, pencatatan, analisis dan interpretasi dengan kondisi yang terjadi. Dari hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa kebijakan pemerintah dengan menerapkan PPKM memberikan dampak yang sangat besar dalam sektor ekonomi terutama pada pedagang dan UMKM. Pembatasan untuk melakukan aktivitas dengan skala yang besar otomatis akan mengakibatkan kondisi ketahanan ekonomi Kelurahan Srandol Kulon diambang ketidakstabilan yang berimbas pada tingkat pengangguran yang semakin melonjak. Maka dengan itu dalam penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apasaja faktor-faktor pendorong keberhasilan untuk menstabilkan ketahanan ekonomi di Kelurahan Srandol Kulon.

Kata kunci: Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Dampak, Ketahanan Ekonomi

ABSTRACT

The spread of the Covid-19 Virus that is currently occurring is increasingly causing various problems. The impact can be seen from various sides of life, namely in the economic, social and public welfare sectors. Coupled with the number of cases that continue to increase. Therefore, the Government must provide protection to the community in preventing and handling Covid-19 cases as mandated by the 1945 Constitution. The step taken by the government is through the implementation of the Policy on the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM). However, this policy has an impact on aspects of national economic resilience. This study aims to determine and analyze the impact of economic resilience and what are the success factors in strengthening economic resilience in Sronдол Kulon Village. This research uses a qualitative approach using a descriptive method type, the research content contains efforts to describe, record, analyze and interpret the conditions that occur. The results of the study show that government policies by implementing PPKM have a huge impact on the economic sector, especially on traders and MSMEs. Restrictions to carry out activities on a large scale will automatically result in the condition of the economic resilience of Sronдол Kulon Village on the verge of instability, which has an impact on the soaring unemployment rate. Therefore, this research also aims to see what are the driving factors for success in stabilizing economic resilience in Sronдол Kulon Village.

Keywords: Policy on the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM), Impact, Economic Resilience

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang telah terjadi hampir 2 tahun berjalan ini, menjadi titik berat bagi Indonesia dalam menangani masalah pandemi Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*). Dalam permasalahan pandemi Covid-19 ini menimbulkan berbagai masalah dan dampak dari berbagai sisi kehidupan, salah satu yang paling mempengaruhi yaitu dibidang sosial, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pandemi yang telah berskala global ini membuat pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan contohnya seperti perundang-undangan dan peraturan seperti PSBB dimasa awal pandemi Covid-19 yang dilakukan di bulan April 2020. Diberlakukan PSBB sebenarnya tidak benar-benar mengurangi dampak namun malah membuat segi ekonomi masyarakat menurun. Selama pemberlakuan PSBB transisi yang terjadi di tengah-tengah membangkitkan kembali perekonomian yang sempat terpuruk, kini malah meningkat kembali kasus penularan Covid-19 yang begitu cepat dan terus menerus di bulan Juni 2021, yang mengharuskan pemerintah mengambil keputusan dan tindakan dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mulai diberlakukan pada tanggal 3-20 Juni 2021 dan berlanjut hingga Agustus 2021.

Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ke-empat dengan jumlah kasus positif baru sekitar 4.666 kasus dan jumlah kasus meninggal sebanyak 398 kasus. Dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah 13 diantaranya termasuk ke dalam asesmen level 4 dan 22 daerah lainnya masuk asesmen level 3. Dengan naiknya angka persebaran secara nasional tentunya mengharuskan pemerintah melakukan langkah-langkah preventif dalam pencegahan persebaran semakin luas. Maka dari itu Pemerintah Kota Semarang juga mengeluarkan kebijakan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Pemerintah Daerah. Untuk penanganan Covid-19, Pemerintah segera membentuk gugus tugas dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 melalui keputusan Walikota Nomor 180/278 tahun 2020. Berikut merupakan grafik perkembangan kasus kumulatif Covid-19 diseluruh Kota Semarang di tahun 2021. Seperti temuan yang dilakukan oleh Susanto & Asmara (2020), mendukung kebijakan PPKM yang

perlu diambil dalam rangka membatasi pergerakan masyarakat yang bertujuan untuk mencegah penularan covid-19, karena baik secara ekonomi dan Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dibagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*), dan tidak dicabut (*inalienable*). Dengan berpegang pada prinsip “*salus populi suprema lex esto*” keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Powell, 2006).

Dalam mengembalikan ketahanan ekonomi yang runtuh didaerah Srandol Kulon tersebut, perlunya meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam usaha sekaligus untuk meningkatkan kualitas usaha agar kesejahteraan keluarga terwujud yang bersumber dari peningkatan pendapatan keluarga (Nurdewanto dan Yuniriyanti, 2015). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) saat pandemi Covid-19 melanda tercatat jumlah pencari kerja sebanyak 220.763 orang dan hanya 81.835 atau 37,7% yang hanya diterima kerja, sisanya sebagai pengangguran.

Melalui desentralisasi, daerah diberikan wewenang untuk menentukan sendiri prioritas pembangunan kesehatan serta ketahanan ekonomi daerahnya sesuai kemampuan, kondisi

dan kebutuhan setempat. Dengan demikian daerah diharapkan mampu melakukan perencanaan dengan baik. Hal inilah yang terjadi di Kota Semarang, dengan berfokuskan kepada masyarakat yang paling berdampak yaitu para pedagang maka pemerintah Kota Semarang menginisiasi sebuah evaluasi program yang diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap Kesehatan dan ketahanan ekonomi bagi warga masyarakatnya, terlebih yang menjadi rujukan penelitian penulis di wilayah Kelurahan Srandol Kulon.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat di wilayah Kelurahan Srandol Kulon serta mencari tahu apa saja faktor-faktor pendorong keberhasilannya.

TINJAUAN TEORI

a. Teori Implementasi

Kebijakan Publik

Sebuah istilah kebijakan atau *policy* seringkali digunakan untuk merujuk kepada sikap seorang *stakeholder* baik itu pejabat atau kelompok strategis ataupun lembaga-lembaga pemerintahan yang berada pada kegiatan tertentu. Adapun

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981:1) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*) Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung beberapa makna yaitu : (1) kebijakan publik tersebut hanya dibuat oleh badan pemerintahan saja bukan badan organisasi swasta, (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Implementasi Kebijakan Publik dapat diartikan sebagai salah satu aktivitas didalam proses kebijakan yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu berkaitan erat dengan kepentingan publik dan kemudian bisa diterima oleh publik. Menjadi fokus peneliti adalah melihat bagaimana tingkat kepatuhan (*compliance*) dalam sebuah implementasi proses kebijakan, karena dengan melihat kepatuhan bisa menilai bagaimana sebuah kebijakan

bisa di evaluasi dengan kesimpulan gagal atau berhasil.

menggunakan Teori dan Model Implementasi Kebijakan (George C. Edwards III, 1980:1), mengatakan bahwa implementasi kebijakan suatu proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang akan menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan, dan implementasinya juga harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Namun pandangan George C. Edwards III dalam Leo Agustino (2006:150) mereka menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, yaitu : “*Communication, Resources, Disposition or Attitudes, and bureaucratic Structure*”

a. Komunikasi (*communication*)

Dalam pandangan Edward III dalam Widodo (2010: 97) komunikasi suatu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*),

b. Sumberdaya (*resources*)

Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah jumlah dan kemampuan para staf, kekuasaan dan wewenang serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Edward III dalam Widodo (2010:98) mengatakan bahwa sumberdaya tersebut juga meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumber daya peralatan serta sumberdaya kewenangan.

1. Sumberdaya Manusia
2. Sumberdaya Anggaran
3. Sumberdaya Peralatan
4. Sumberdaya Kewenangan

c. Disposisi (*disposition*)

sikap dari pelaksana program akan sangat berpengaruh di dalam

pelaksanaan program. Sikap pelaksana yang positif terhadap suatu program atau suatu kebijakan akan memungkinkan pelaksanaan dengan sukarela sesuai aturan yang ada.

d. Struktur Birokrasi

(*Bureaucracy*)

Dalam struktur ini ada dua karakteristik birokrasi SOP (*Standart Operating Procedures*) dapat mempengaruhi implementasi, yaitu dapat mempengaruhi perubahan-perubahan dalam kebijakan. Hal yang bisa terjadi adalah pemborosan sumber daya, peningkatan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, menghambat koordinasi dan membingungkan para pelaksana di tingkat bawah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif yang berupaya pendeskripsian, pencatatan, analisis dan interpretasi dengan kondisi yang terjadi. Dengan suatu proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif,

landasan teori yang digunakan adalah sebagai panduan fokus peneliti agar sesuai dengan fakta di lapangan.

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Implementasi Kebijakan

Penelitian ini menghasilkan bahwa lonjakan kenaikan kasus Covid-19 tidak bisa dipungkiri semakin menambah kekhawatiran masyarakat. Pemerintah memberlakukan berbagai upaya seperti PSBB, PPKM Mikro, hingga PPKM darurat. Pandemi memberikan dampak yang begitu besar bagi tatanan hidup masyarakat. Masyarakat dihadapkan pada situasi dengan kebijakan-kebijakan yang dikerahkan oleh pemerintah tentunya banyak masyarakat antara pro dan kontra selama berjalannya kebijakan tersebut. Terutama yang semakin sulit salah satunya ialah dampak yang terasa bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Adanya pembatasan jam operasional di masyarakat terutama pada sektor ekonomi semakin mempersempit pergerakan para pelaku UMKM.

Mobilitas yang dibatasi juga pendapatan yang menurun berdampak besar pada para pelaku UMKM. Adanya

pemberlakuan penyekatan ke luar kota di setiap daerah Jawa dan Bali memberikan pengaruh negatif pada perkembangan UMKM. Produksi, distribusi, dan pemasaran yang biasanya dapat memberikan keuntungan sehingga para pelaku UMKM bisa menutupi anggaran untuk kebutuhan bahan baku hingga penggajian karyawan, secara drastis mengalami kemerosotan. Tentunya ini menjadi ancaman bagi perekonomian nasional, karena sebagaimana diketahui bahwa UMKM berkontribusi besar dan krusial bagi perekonomian nasional.

Para pelaku UMKM mengalami penurunan omset pendapatan yang cukup signifikan. Keadaan yang menjadi serba sulit pun tidak dapat dihindarkan, tidak jarang para pelaku UMKM yang tidak lagi mampu bertahan dengan terpaksa harus gulung tikar atau beralih profesi. Tidak ada pilihan bagi para pelaku UMKM selain bisa bertahan sebisa mungkin atau menyerah, karena tidak jarang untuk bertahan di tengah pandemi dengan peraturan pada PPKM darurat ini banyak yang dikorbankan para pelaku UMKM baik secara materil dan immaterial. Pemerintah harus cermat membaca situasi dan kondisi yang terjadi secara dekat dan mendetail, walaupun berbagai laporan survey dirilis dalam bentuk angka dengan redaksi judul kemunduran UMKM, namun yang nyata ialah yang terjadi bukan dalam bentuk

persentase saja tapi juga nasib UMKM yang terancam dalam PPKM darurat di masa pandemi ini.

B. Publikasi Program Ketahanan Ekonomi Kelurahan Srandol Kulon

Dalam menjalankan program ketahanan ekonomi, pemerintah kelurahan srandol kulon menggunakan berbagai kanal media diantaranya:

1. Instagram

Akun Instagram kelurahan Srandol Kulon dengan nama pengguna @kel_srandolkulon secara aktif memberikan informasi publikasi kepada masyarakat mengenai program yang akan dilaksanakan serta melaporkan kegiatan secara langsung atau melalui *release media*.

2. Website

Website pemerintah kelurahan srandol kulon berada dalam domain milik pemerintah kota semarang, laman ini aktif memberikan informasi yang bersifat kehumasan kepada masyarakat, terdapat pula informasi public yang dapat diakses dengan mudah diantaranya profil kelurahan, layanan administrasi, kelembagaan, dan lain-lain.

3. Media Massa

Media masa yang bekerja sama dengan pemerintah memiliki peran penting sebagai corong informasi yang menyediakan sarana publikasi agar

informasi dapat menyebar luas kepada masyarakat, dalam hal ini pemerintah kelurahan srandol kulon menggandeng beberapa media skala lokal, regional, hingga nasional untuk mempublikasikan kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya:

- a. Suarabaru.id :
<https://suarabaru.id/2021/02/16/babinsa-srandol-kulon-aktif-bersosialisasi-bersama-tim-ppkm-mikro>
- b. Detik.com :
<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5651830/semarang-tetap-di-level-4-walkot-hendi-akui-angka-kematian-masih-tinggi>
- c. Kompas.com :
<https://kilasdaerah.kompas.com/semarang/read/2021/07/21/20355071/jika-kasus-covid-19-turun-pemkot-semarang-akan-longgarkan-pembatasan>

C. Disposisi Program

Adanya program Kebijakan PPKM Darurat maka Walikota Semarang, Bapak Hendrar Prihadi menyerahkan bantuan berupa sembako kepada warga dan juga sekaligus memberikan bantuan kursi roda untuk anak disabilitas dalam acara peresmian Posko Siaga Candi Hebat di Kelurahan Srandol Kulon Kecamatan Banyumanik. Posko Kampung Siaga Candi

Hebat sendiri merupakan suatu program untuk warga masyarakat sebagai upaya tanggap terhadap pencegahan penyebaran Covid-19. Dalam penyerahan bantuan tersebut Bapak Hendrar didampingi oleh Bapak Muhammad Khadik, selalu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Semarang serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kecamatan Banyumanik, Semarang.

Selain pemerintah terdapat pula Lembaga yang membantu jalannya program ketahanan ekonomi di Kelurahan Srandol Wetan yaitu Universitas Diponegoro melalui program KKN, adapun tim KKN Undip yang menjalankan program di Srandol Wetan memiliki gagasan yang dituangkan ke dalam program berupa Sosialisasi Tips Berjualan Online Kepada Pelaku UMKM Di Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang Berdasarkan informasi yang diperoleh dari RW 08 Kelurahan Srandol Kulon, banyak warga yang kehilangan pekerjaannya termasuk yang sehari-harinya bekerja sebagai pedagang akibat Covid-19. Hal ini disebabkan kurangnya kemampuan para warga dalam memahami kecanggihan teknologi yang sedang berkembang saat ini, salah satunya yaitu kurangnya pemahaman warga dalam mempromosikan produknya

berbasis digital marketing yaitu melalui media online seperti shopee, instagram, tokopedia dan lain-lain. Dengan memanfaatkan marketplace maka jangkauan penjualan UMKM semakin luas sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya.

KESIMPULAN

Selain pemerintah terdapat pula Lembaga yang membantu jalannya program ketahanan ekonomi di Kelurahan Srandol Wetan yaitu Universitas Diponegoro melalui program KKN, adapun tim KKN Undip yang menjalankan program di Srandol Wetan memiliki gagasan yang dituangkan ke dalam program berupa Sosialisasi Tips Berjualan Online Kepada Pelaku UMKM Di Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang Berdasarkan informasi yang diperoleh dari RW 08 Kelurahan Srandol Kulon, banyak warga yang kehilangan pekerjaannya termasuk yang sehari-harinya bekerja sebagai pedagang akibat Covid-19. Hal ini disebabkan kurangnya kemampuan para warga dalam memahami kecanggihan teknologi yang sedang berkembang saat ini, salah satunya yaitu kurangnya pemahaman warga dalam mempromosikan produknya berbasis digital marketing yaitu melalui media online seperti shopee, instagram,

tokopedia dan lain-lain. Dengan memanfaatkan marketplace maka jangkauan penjualan UMKM semakin luas sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Afabeta .
- Andik. (2021, April 7). <https://www.gatra.com/news-508532-ekonomi-ekonomi-semarang-minus-161-hendi-optimis-2020-bangkit-.html>. Retrieved Juli 9, 2022, from <https://www.gatra.com/>: <https://www.gatra.com/news-508532-ekonomi-ekonomi-semarang-minus-161-hendi-optimis-2020-bangkit-.html>
- Detik. (2021, Juli 6). <https://news.detik.com/berita/d-5633296/mobilitas-warga-di-ppkm-darurat-baru-turun-27-dari-target-50>. Retrieved Juli 7, 2022, from <https://news.detik.com/>: <https://news.detik.com/berita/d-5633296/mobilitas-warga-di-ppkm-darurat-baru-turun-27-dari-target-50>
- Dhey, T. R. (1995). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Ekon. (2021, Juli 21). <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3159/penerapan-ppkm-untuk-mengendalikan-laju-covid-19-dan-menjaga-kehidupan-masyarakat>. Retrieved Juli 7, 2022, from <https://ekon.go.id/>: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3159/penerapan-ppkm-untuk-mengendalikan-laju-covid-19-dan-menjaga-kehidupan-masyarakat>.
- Gillin, J. L. (1950). *Cultural Sociology* . New York: Macmillan.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Gulo, K. K. (1987). *Kamus Psikologi*. Bandung: Pionir Jaya.
- Islamy, M. (2000). *Policy Analysis : Seri Monografi Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Jatengprov. (2021, Juli 14). https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=5411. Retrieved Juli 7, 2022, from <https://humas.jatengprov.go.id/>: https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=5411
- Kompas. (2021, Juli 3). <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/03/083000865/resmi-berlaku-ini-alasan-pemerintah-terapkan-ppkm-darurat-jawa-bali>. Retrieved Agustus 12, 2022, from <https://www.kompas.com/>: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/03/083000865/resmi-berlaku-ini-alasan-pemerintah-terapkan-ppkm-darurat-jawa-bali>
- Livermore, J. M. (2009). *The Handbook of Social Policy*. California: SAGE Publication Ltd.
- McSween, T. E. (2003). *The Values-Based Safety Process: Improving Your Safety* . New Jersey: Hoboken.
- Nic Newman with Richard Fletcher, A. S. (2021). *Reuters Institute Digital News Report 2021*. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism.

- PPID. (2021, Juli 2). <https://ppid.semarangkota.go.id/ppkm-di-kota-semarang/>. Retrieved 8 Jumat, 2022, from <https://ppid.semarangkota.go.id/>
<https://ppid.semarangkota.go.id/ppkm-di-kota-semarang/>
- Purbaya, A. A. (2021, Juli 26). <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5657219/ppkm-level-4-di-semarang-warung-bisa-layani-30-persen-kapasitas-pelanggan>. Retrieved Agustus 12, 2022, from <https://news.detik.com/>
https://news.detik.com
- Ramón A. Feenstra, S. T. (2016). *La reconfiguración de la democracia*. Granada: Comares.
- Rosenstiel, B. K. (2007). *The elements of journalism: What newspeople should know and the public should*. Newyork: Three Rivers Press.
- Slameto. ((Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat 2005)2010). *Belajar dan Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Smallwood, R. N. (1980). *The Politics of Policy Implementation*. New York: St. Martin's Press.
- Soebiato, T. M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Surachmad, W. (1985). *Dasar Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*. Jakarta: Tarsito.
- Tjokromidjojo, B. (1989). *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta : Gunung Agung.
- Walgito, B. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.